



Pertanyakan Aset Belum Tercatat

Peralatan dan Mesin di 29 Sekolah Negeri

SINGKAWANG- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang

Tahun Anggaran 2014.

Fraksi PKB dalam pandangan umum fraksi DPRD Kota Singkawang atas nota pengantar Walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2014, menyebutkan pengecualian sesuai penilaian dari BPK terkait penyajian saldo, pengelolaan aset tetap, peralatan, dan mesin Pemerintah Kota Singkawang pada neraca per 31 Desember

2014 sebesar Rp52,14 Miliar, yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

Pada Dinas Pendidikan Kota Singkawang, belum mencatat nilai aset tetap peralatan dan mesin pada 29 Sekolah negeri. Tak hanya di dinas pendidikan, aset tetap, peralatan dan mesin pada 16 SKPD lainnya juga terjadi hal sama.

Untuk di luar dinas pendidikan, sebesar Rp20,85 miliar yang belum diketahui keberadaannya. "Fraksi PKB meminta kepada Walikota Singkawang, sesuai laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut agar memerintahkan kepada inspektorat Kota Singkawang untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atas aset tetap peralatan dan mesin pada SKPD," kata Husin juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Singkawang.

Hal tersebut juga sebagai upaya untuk mengetahui keberadaan serta mereview pencatatan aset. Termasuk aset-aset lainnya, seperti aset tetap tanah, aset tetap peralatan, dan mesin, "Terutama aset tetap gedung dan bangunan pada sekolah negeri yang belum dicatat oleh Dinas Pendidikan," katanya. Pihaknya juga meminta Walikota memerintahkan kepada TPKD untuk memproses tuntutan ganti rugi atas kehilangan, dan ketiadaan barang inventarisir pada SKPD jika ada yang tidak jelas keberadaannya. "Kita juga mempertanyakan sejauh mana Pemkot menindaklanjuti LHP BPK RI," katanya. (fah)